

Pemerintah Masih Optimistis

Rabu, 06/02/2008



Sumber: <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/ekonomi-bisnis/pemerintah-masih-optimistis-2.html>

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah tetap optimistis bisa mencapai target pengurangan kemiskinan tahun 2008 menjadi sebesar 15% dari total penduduk.

”Insya Allah, kita tetap optimistis bahwa target pengurangan kemiskinan, seperti yang ditakutkan sejumlah pihak tidak tercapai, akan bisa kita capai pada tahun ini,” ujar Sesmeneg PPN/ Kepala Bappenas Syahril Loetan di Jakarta kemarin. Menurut Syahril, optimisme tersebut didasarkan pada semangat perubahan APBN 2008, yaitu mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat akibat naiknya harga pangan.

Hal ini terlihat dari banyaknya anggaran yang dialokasikan pada subsidi harga pangan untuk menjaga kualitas masyarakat kelas bawah. ”Dalam perubahan itu, kan ada banyak anggaran ke subsidi pangan, subsidi listrik, dan penambahan raskin (beras untuk rakyat miskin). Askeskin (asuransi kesehatan untuk rakyat miskin) juga ditambah. Jadi sebetulnya, ini (perubahan) lebih bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat,” papar dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian mengatakan bahwa perubahan APBN 2008 bisa berdampak serius bagi upaya pemerintah mengurangi jumlah masyarakat miskin pada 2008. Pasalnya, perubahan APBN berarti mengubah asumsi makro dalam APBN.

”Karena itu, sulit bagi pemerintah untuk bisa mencapai angka pengurangan seperti yang diinginkan,” ujar dia. Pengamat ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro mengatakan, pengurangan kemiskinan tidak bisa dilakukan pemerintah melalui APBN. Menurut dia, berdasarkan pengalaman selama ini, alokasi APBN tidak terlalu efektif dalam mengurangi kemiskinan.

”Kita itu punya banyak masyarakat dalam kategori near poor (mendekati miskin). Mereka langsung merasakan dampak kalau harga itu naik. Misalnya pemerintah dengan APBN berharap kemiskinan bisa ditekan di level 16,7%. Tapi ketika BBM naik, angka ini tetap di level itu, bahkan cenderung naik,” ujar Mudrajad.

Mudrajad mengatakan, seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi dalam menjaga efektivitas pengontrolan harga komoditas. Pasalnya, faktor ini merupakan parameter penting naik turunnya jumlah masyarakat miskin.

Namun, pemerintah juga harus mengimbangnya dengan penekanan efektivitas

program- program penanggulangan kemiskinan dalam mencapai sasarannya. "Kalau pemerintah menambah volume raskin, saya curiga itu hanya akal-akalan politis pemerintah agar masyarakat miskinnya tidak marah. Seharusnya, kan efektivitas program yang lebih mendasar yang ditekankan," jelas dia. (zaenal muttaqin)